



Demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2024

Saiman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.111>

CORRESPONDENCE

E-mail: saiman@umm.ac.id

KEYWORDS

Demokrasi, Kepemimpinan, Indonesia

ABSTRACT

Launch of 2020 Indonesian Ombudsman Annual Report on Monday 8 February 2021, President Joko Widodo said "public be active in conveying criticism, input, or potential maladministration." Public service providers continue to increase efforts improvements. On the other hand, President's statement is very contradictory or contrary to socio-political and democratic developments society occurred Jokowi became President of Indonesia for 2nd period in 2019-2024. Several socio-political events that occurred showed democratic process in Indonesia experienced shift or decreased percentage. This paper describes and analyzes development of Indonesian democracy during leadership of President Joko Widodo Period II and factors decline development of democracy in Indonesia. This paper uses reference studies and documentation data collection techniques, sources, and uses a qualitative descriptive analysis of development democracy in Indonesia during President Jokowi's second period. The results of study found and according to Compas research until October 7 2022, that a decline development of democracy in Indonesia, decrease in public trust in performance of Jokowi-Amin Government field of law enforcement, only at 51.5%. Achievement is down compared to the results of previous survey in June 2022. The economic sector is only 50.8% to rising prices of basic commodities which continue increase. Eventhough, social welfare sector is still 74% is possibility to be temporary, because BLT has been disbursed community, political and security sector 74.6%, increasing lack of response or (bored) public response socio-political situation dominated by political party activities 2024 election.

PENDAHULUAN

Tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali turun (Zaini, 2019). Penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum, sehingga perlu ada lompatan perbaikan agar bangsa tak terjerembab dalam disorientasi yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah

(Stutzer et al., 2019). Pada acara peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin 8 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Presiden juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi (Fukuyama, 1992).

Para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan (Putra et al., 2021). Presiden Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 walaupun relatif berhasil. Presiden berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan-catatan yang disampaikan Ombudsman RI (Serek & Lomicova, 2020). "Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," Presiden Jokowi pun meminta seluruh pihak menggunakan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 (Farhaini et al., 2022). Pernyataan Presiden Jokowi langsung mendapatkan reaksi dari masyarakat dengan berbagai ragam makna.

Munculnya tanggapan masyarakat bukan disebabkan perayaan atas apa yang diucapkan Presiden Jokowi, melainkan lebih disebabkan kepada rasa terkejut bercampur sinis saat menemukan di mana letak kekonyolan dari ucapan tersebut (Amiin, 2021). Pernyataan Presiden memang sangat mengejukan masyarakat karena masyarakat menjadi heran bahkan bingung setelah mencermati berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi di tanah air setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia periode ke-II bersama Maruf Amin. Pada sisi lain bila pernyataan Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah dicermati, maka merupakan suatu pernyataan yang sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan perkembangan sosial politik dan demokrasi masyarakat yang terjadi setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode ke-II. Beberapa peristiwa sosial politik yang terjadi menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dan bahkan kemunduran (Arend, 1984). Peristiwa demostrasi tentang protes masyarakat menolak terhadap ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law) yang terjadi pada bulan Oktober 2020 di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia menunjukkan komunikasi politik antara masyarakat dengan negara mengalami kebuntuan, bahkan menunjukkan kekuasaan negara lebih dominan terhadap kedaulatan rakyat (Putra & Dhanuarta, 2021).

Aparat keamanan melakukan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa. Tindakan aparat keamanan (kepolisian) dinilai sebagai bentuk anti demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak menyatakan pendapat di hadapan publik, bahkan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa diperlakukan sebagai pelanggaran aturan pandemi Covid-19 karena tidak memakai masker dan melakukan kerumunan (tindak pidana), bukan sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pendapat (Sandy, 2018). Pernyataan Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah, juga ditanggapi oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, pada acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jusuf Kalla mengatakan bahwa "Pertama,

demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik (Wahidah et al., 2023). Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi (Almond et al., 1963).

Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," "Kedua, Jusuf Kalla pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi (Sager, 2018). Jusuf Kalla juga menggarisbawahi aspirasi masyarakat, bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pelaporan ke penegak hukum (Rahmatulloh, 2013). Karena itu, penting prinsip dasar demokrasi harus ditegakkan kembali (Aini et al., 2023). Hal ini juga harus dilakukan oleh Fraksi PKS sebagai salah satu bagian dari legislatif.

PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai kewajiban kritik, checks and balances, agar terjadi control kepada pemerintah (Putra & Hijri, 2022). Pernyataan Jusuf Kalla ini menunjukkan adanya indikasi tidak terjadi checks and balances pada penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah (Putra & Hadi, 2022). Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia sangat rendah. Bahkan, kata dia, tidak jarang ada yang menganggap Indonesia menghadapi kebangkrutan demokrasi atau democracy bankruptcy. "Karena demokrasi itu enggak tampil dalam realitas," Menurut Din, demokrasi seharusnya menjadi alat untuk menuju keadilan bagi semua masyarakat. Namun, terkadang hal itu sulit diwujudkan terlebih lagi saat diturunkan ke instrumen demokrasi lainnya seperti pemilihan presiden dan legislatif (Sa'adawisna & Putra, 2022).

"Apalagi ketika liberalisme politik membuka peluang bagi peran dan intervensi, oligarki, ekonomi dan politik, maka demokrasi itu sendiri kehilangan arah," (John & Sjoberg, 2020). Mencermati perkembangan sosial politik yang terjadi saat ini khususnya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia tentunya menjadi pertanyaan dan diskusi yang menarik untuk dilakukan kajian, karena secara politik berdasarkan hasil pemilu 2019, presiden terpilih atas dasar suara mayoritas (legitimasi rakyat) maka semestinya perkembangan demokrasi di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan demokrasi di Indonesia?

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif karena fokusnya adalah pada fenomena yang terjadi di lingkungan alami, dunia nyata, yang ingin diselidiki dengan segala kerumitannya (Leedy & Ormrod, 2014). Tiga jenis pengumpulan data kualitatif yang dilakukan adalah wawancara mendalam, wawancara terbuka, observasi langsung, dan dokumen tertulis. (Patton, 2014) mencatat bahwa studi kualitatif bervariasi berdasarkan jenis, tujuan, dan kualitas. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif tepat karena melayani tujuan deskriptif, di mana menggunakan pertanyaan wawancara terbuka yang dapat mengungkap

sifat pengaturan organisasi serta proses, hubungan, dan individu yang terlibat. Dengan cara ini, penelitian kualitatif dapat mengisi kesenjangan dalam literatur.

Desain studi kasus kualitatif menjadi pilihan untuk penelitian ini. Alasan untuk mempertimbangkan studi kasus adalah bahwa demokrasi adalah konsep tunggal untuk dijelajahi sebagai suatu proses. Tujuan pendekatan studi kasus adalah untuk memahami suatu persoalan dengan menggali satu atau lebih kasus dalam suatu sistem yang terikat (setting atau konteks), yang dapat berupa objek kajian dan produk penyelidikan. Fokusnya adalah pada pengembangan deskripsi dan analisis yang mendalam dari satu kasus atau beberapa kasus untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah penelitian (Schwandt, 2015). Masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini cocok untuk desain studi kasus karena berkaitan dengan pengalaman hidup para pemimpin senior yang mempraktekkan demokrasi kepemimpinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat dalam tingkat daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. DPRD bertanggung jawab untuk membuat, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai partai politik, yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Melalui proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, DPRD memiliki peran strategis dalam membangun kerangka kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan memajukan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo mengatakan "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," saat acara peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021. Pada sisi lain, pernyataan Presiden merupakan suatu pernyataan yang sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan perkembangan sosial politik dan demokrasi pada masyarakat yang terjadi setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode ke-II tahun 2019-2024. Beberapa peristiwa sosial politik yang terjadi menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran atau penurunan persentase (Sorensen, 1993). Pernyataan Presiden memang sangat mengejukan masyarakat karena masyarakat menjadi heran bahkan bingung setelah mencermati berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi di tanah air setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia periode ke-II bersama Maruf Amin (Mas'oed, 2002). Peristiwa sosial politik yang tidak bisa diabaikan adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan masyarakat buruh tentang undang-undang Cipta Kerja dan korupsi pejabat pemerintah daerah yang banyak menjadi sorotan masyarakat (Ghia, 1994).

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar Indonesia menunjukkan komunikasi politik antara masyarakat dengan negara mengalami kebuntuan, bahkan menunjukkan kekuasaan negara lebih dominan terhadap kedaulatan rakyat (Putra, 2022). Aparat keamanan

melakukan penangkapan dan penanganan terhadap unjuk rasa (Gallier, 2020). Tindakan aparat keamanan (kepolisian) dinilai sebagai bentuk anti demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak menyatakan pendapat di hadapan publik (Putra & Salahudin, 2022). Berdasarkan hasil survei kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh Kompas Oktober 2022, maka angka atau tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali turun. Tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kian tergerus setelah survei September 2022, bahkan beberapa aspek mengalami penurunan sejak Januari 2022.

Pemerintah harus menjadikan penilaian publik sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia (Elbahnsawy, 2020). Secara umum, masyarakat dapat menilai bahwa, pada beberapa bulan sejak Januari 2022 banyak hal-hal yang terjadi dan dinilai menjadi beban masyarakat, namun kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan tersebut, seperti terjadinya kenaikan minyak goreng yang menyebabkan masyarakat menjadi cukup kesulitan dalam mencari minyak goreng yang murah sesuai kebutuhan, bahkan sampai terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat singnifikan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 bahwa riset Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan indeks demokrasi Indonesia 2020 di peringkat ke-64 dari 167 negara-negara di dunia dengan skor 6,3. Angka itu menurun dari penilaian EIU tahun 2019, yang mana Indonesia mendapat skor 6,48. Indeks demokrasi Indonesia pada 2019 terbilang naik ketimbang tahun sebelumnya (Putra & Sihidi, 2022). Pada 2017 dan 2018, Indonesia mendapatkan angka 6,39. Catatan selama tiga tahun terakhir ini terbilang buruk ketimbang periode 2015 dan 2016. Pada 2015, indeks demokrasi Indonesia di angka 7,03 dan pada 2016 di angka 6,97 (Correa-Lopera, 2019). Penurunan angka tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada tahun 2022, sehingga menganggu perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pada beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Penegakan Hukum. Mengacu pada hasil survei Litbang Kompas periode Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 62,1 persen atau turun 5 persen dari survei Juni 2022. Oleh karena itu perlu ada lompatan perbaikan agar bangsa tidak terjerembab dalam disorientasi yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal hasil survei Kompas Januari 2022, tingkat kepuasan masyarakat mencapai level tertinggi selama pemerintahan Jokowi-Amin yakni 73,9 persen. Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait penegakan hukum seperti Mahkamah Agung (MA) dengan kasus dugaan jual beli perkara turun 10,2 persen menjadi 52 persen. Polri turun terdalam, yakni turun 17,2 persen menjadi 49 persen dengan terjadinya kasus Sambo-Yosua dan tragedi Kanjuruan Malang, karena penembakan gas air mata oleh pihak Polri. Pada September 2022, berdasarkan jajak pendapat pada masyarakat sebanyak 504

responden dari 34 provinsi, maka ada 21,5 responden mengatakan bahwa telah terjadi perlakuan yang tidak sama di depan hukum, dan 7 persen responden menyebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Arita menilai situasi ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perubahan kondisi demokrasi. "Pemerintah perlu ambil bagian untuk menciptakan iklim demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi publik," (Kompas, 19/9/2022).

- b. Pada Aspek Kinerja Pemerintahan, penurunan tingkat kepuasan diikuti penurunan tingkat keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan. Hasil survei periode Oktober 2022 menunjukkan tingkat keyakinan pada angka 52 persen, terendah sejak awal pemerintahan 2019. Pada survei Juni 2022, tingkat keyakinan 63,5 persen dari Januari 2022 sebesar 70,5 persen. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan kenaikan minyak goreng yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurut karena kesulitan mencari minyak goreng dan kenaikan BBM sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat. Sementara disisi lain terus bertambahnya pejabat pemerintah yang terjerat pada kasus korupsi yang semestinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Survei Litbang Kompas September 2022, juga menemukan bahwa mayoritas publik menilai maraknya korupsi menjadi penghambat demokrasi. Hasil survei menunjukkan ada 43,2 persen responden menyebutkan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang menghambat jalannya demokrasi di Tanah Air. "Persoalan laten korupsi dianggap oleh kelompok terbesar responden sebagai batu sandung berjalannya demokrasi," tutur Arita Nugraheni. Hal lain juga yang dianggap menjadi penghambat jalannya demokrasi pada aspek kinerja Pemerintahan seperti keterpurukan ekonomi yang dipilih 21,8 persen responden. (Kompas, 19/9/2022). Berdasarkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo.
- c. Pada Aspek Ekonomi, tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan juga menurun hanya mencapai 50,8 persen yang terjadi di semua lapisan ekonomi masyarakat, pada masyarakat ekonomi menengah bawah hingga tingkat bawah bahwa tingkat kepuasan publik menurun. Sementara sikap golongan masyarakat yang secara ekonomi lebih mapan justru lebih kritis terhadap perkembangan ekonomi yang sangat tidak stabil sehingga mempengaruhi perkembangan usaha

ekonomi masyarakat, terutama di bidang kuliner, seperti kenaikan bahan baku kedelai, kenaikan harga telur, kenaikan harga minyak goreng dan terlebih lagi karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pengaturan penggunaan BBM pada masyarakat.

- d. Pada Aspek politik dan keamanan, tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan masih tinggi mencapai 74,6 persen. Hal ini tentu sangat penting, karena masyarakat masih sangat mengharapkan pemerintah harus selalu tetap menjaga aspek politik dan keamanan supaya masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan rasa aman dan lancar. Namun apakah kondisi politik dan keamanan di Indonesia benar-benar sudah aman? Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius terlebih lagi menjelang Tahun Politik pada 2024. Para pendukung partai politik dan tokoh-tokoh sudah mulai secara terbuka menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada tokoh-tokoh tertentu, bahkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh telah secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem pada pemilu 2024 dan mengajak kepada para kadernya untuk mengedepankan kedewasaan dalam berpolitik berbeda bukan berarti bermusuhan. Dewasa dalam berpolitik, termasuk dalam menyikapi bakal calon presiden 2024, menjadi keniscayaan agar demokrasi di Indonesia semakin baik.

Mencermati perkembangan penurunan angka tingkat kepuasan dan keyakinan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada tahun 2022, Menkopolikan, Mahfud MD mengatakan untuk itu perlu ada orkestrasi dari seluruh institusi kenegaraan agar mempunyai pandangan yang sama tentang masalah yang dihadapi negara dan arah memperbaikinya. Eksekutif tidak bisa bekerja sendirian, tetapi membutuhkan sokongan dari legislatif, selain yudikatif yang juga harus berbenah (Stepan, 1978). Pada Polri dibutuhkan reformasi mental dan kultural. Hal ini menyangkut ketaatan, kedisiplinan, keteladanan, dan ketegasan terhadap anggota Polri. Reformasi juga berkait dengan persoalan gaya hidup mewah anggota Polri yang dikritik Presiden (Ignas, 1998).

Pada Mahkamah Agung (MA), Pemerintah tak bisa langsung membenahinya karena ada prinsip independensi Lembaga Peradilan. Namun melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM, Pemerintah dapat melakukan pembenahan dengan memperbaiki pengelolaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan MA. Setiap tahun ASN bisa dipindah untuk mencegah mereka menjadi perantara jual beli perkara antara hakim dan pihak berperkara (Amiin, 2021). Demokrasi memang merupakan suatu sistem yang terus bergerak, dinamis dan tidak selalu linear dalam menuju demokrasi yang substantif. Karena itu, demokrasi sangat bergantung pada aktor-aktor demokrasi: mulai dari aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil.

Angka indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun tiap tahun adalah peringatan (Sa'adawisna & Putra, 2023). Demokrasi harus diamankan tidak terbatas lewat pemilihan umum, namun juga pada kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas

dapat ditekan. Pada tahun 2019, peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden "Jokowi". Jokowi menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya.

Diantaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditentang banyak pihak. Sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi, bahkan sampai dua mahasiswa tewas setelah bentrok dengan polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal lain kebijakan Jokowi yang menyumbang pelemahan demokrasi, bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpu tentang ormas yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, walau benar secara substansi tapi cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan. Selain itu, perpres jabatan TNI juga dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) dan semangat reformasi.

Masyarakat kuatir karena dimasa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme yang memfasilitasi banyak pelanggaran HAM dan melanggengkan kekuasaan. Pada Oktober tahun 2021, Thomas Power dari University of Sydney, menemukan bahwa demokrasi semakin turun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Yakni pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen, media yang bebas dan berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa. Selanjutnya, Thomas menjelaskan bahwa pada indikator pemilu dan oposisi resmi, Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif.

Menurut Thomas, hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituennya. "Syarat pencalonan presiden semakin sempit dan eksklusif, sehingga hanya dua pasangan calon yang mampu berpartisipasi pada pemilu 2014 dan 2019. Pada indikator penegakan hukum dan lembaga yudisial, kata Thomas, politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat dalam lima tahun terakhir terutama di kepolisian dan kejaksaan. Perlindungan dari perkara hukum menjadi salah satu bentuk patronase yang paling sering efektif bagi pihak penguasa. Termasuk revisi UU KPK hingga polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini menjadi upaya-upaya untuk menghapus independensi lembaga hukum dan lembaga yudisial.

Indikator ketiga yakni media yang bebas dan berkualitas juga mengalami penurunan. Thomas menemukan, media di Indonesia saat ini, kepemilikannya semakin didominasi oleh pihak yang terlibat aktif di pemerintahan. Di sisi lain, media yang mengkritisi pemerintah terancam dilaporkan, atau bahkan dipolisikan. Selanjutnya, indikator terakhir yaitu oposisi

tidak resmi dan aksi unjuk rasa, Thomas melihat menjelang pemilu 2019 lalu, pemerintah mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok opisisi. Contoh adalah ketika munculnya kelompok #2019GantiPresiden, kata Thomas. Ia menilai, tindakan tersebut disebut sebagai upaya melawan radikalisme. Namun, aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk medelegitimasi aksi protes paska pemilu. Sebut saja seperti aksi protes RUU KPK, KUHP, dan Omnibus Law.

Proses aksi unjuk rasa itu, kebebasan berekspresi semakin terancam (Christmann, 2018). Sebab, demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan aparat. Thomas mengatakan bahwa kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan di semua indikator. Maka kami berkesimpulan dengan upaya melemahkan demokrasi dari atas, Indonesia sedang mengalami krisis atas kualitas demokrasi. Menanggapi perkembangan demokrasi di Indonesia dari beberapa indikator tersebut, Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menolak jika demokrasi di Indonesia dikatakan memburuk di era pemerintahan saat ini. Saya ingin mengatakan demokrasi di Indonesia sedang baik-baik saja," ujar Fadjroel melalui diskusi daring pada Ahad, 24 Oktober 2021.

Fadjroel menjelaskan bahwa ruang di dalam demokrasi tetap dibuka, sehingga masyarakat hingga kini masih bisa menyampaikan masukan dan kritik kepada pemerintah, di mana kritik dan masukan itu menjadi evaluasi oleh pemerintah. Fukuyama, mengatakan bahwa harapan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana mereka harus melakukannya, telah meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan negara untuk mewujudkannya. Praktek kapitalisme global saat ini telah melampaui demokrasi dengan terlalu cepat, sehingga pelibatan rakyat dalam tataran domestik negara semakin terkikis (Alfitri, 2009). Negara semakin dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat tanpa menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pertimbangan utama karena harus mengejar ketertinggalan di panggung internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2022 mengalami penurunan. Hal ini karena terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin dibidang penegakan hukum yang hanya berada di angka 51,5 % disertai dengan permasalahan hukum yang terjadi. Capaian ini turun dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Juni 2022. Pada bidang ekonomi hanya 50,8% karena terjadi kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat, sehingga masyarakat menengah kebawah mengalami penurunan daya beli. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa bidang kesejahteraan sosial masih 74 % ada kemungkinan sifatnya sementara, karena telah dicairkan BLT pada masyarakat, serta bidang politik dan keamanan 74,6%, karena semakin kurangnya respon atau tanggapan masyarakat (bosan) terhadap situasi sosial politik yang didominasi oleh aktifitas partai politik dan relawan menjelang pemilu 2024.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor penegakan hukum yang dinilai merugikan negara dan Masyarakat akibat banyaknya korupsi dan ketidakadilan dalam

penegakan hukum di Indonesia. Kemudian disusul dari faktor kinerja pemerintah yang dinilai sangat tidak produksi dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah dinilai sangat lamban dan kurang cepat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada Masyarakat. Selanjutnya yang mempengaruhi juga karena faktor ekonomi yang masih tidak menguntungkan bagi masyarakat. Pemerintah telah memberikan BLT namun dinilai sifatnya hanya sementara dan tidak mampu mengurangi kemiskinan di masyarakat.

REFERENSI

- Aini, D., Farhaini, A., & Putra, B. K. (2023). Community Participation in Improving Health in Remote Areas: A Literature Review. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 6(2), 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7798056>
- Alfitri, R. (2009). Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 4(1).
- Almond, A., Gabriel, A., & Sidney, V. (1963). *The Civic Culture Princeton*. New Jersey: Princeton University Press.
- Amiin, A. R. (2021). *Siapa Mau Jadi Tumbal?* Jawa Pos.
- Arend, L. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in TwentyOne Countries*. New Heaven Conn: Yale University Press.
- Christmann, P. (2018). Economic Performance, Quality of Democracy and Satisfaction with Democracy. *Electoral Studies*, 53, 79–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.04.0 04>
- Correa-Lopera, G. (2019). Demand of Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 60(May). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.00 4>
- Elbahnsawy, N. G. (2020). Democracy, Political Instability, and Government Tax Effort in Hydrocarbon-Dependent Countries. *Resources Policy*, 65(11), 101–530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.1015 30>
- Farhaini, A., Putra, B. K., & Aini, D. (2022). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Halodoc di Kota Mataram. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2416>
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Gallier, C. (2020). Democracy and Compliance in Public Goods Games. *European Economic Review*, 121, 103–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2019.10 3346>
- Ghia, N. (1994). "Nationalism and Democracy", dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed) *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*. London: Johns Hopkins University Press.
- Ignas, K. (1998). *Budaya Politik atau Moralitas Politik?* Kompas.
- John, P., & Sjoberg, F. M. (2020). Partisan Responses to Democracy Promotion-Estimating the Causal Effect of a Civic Information Portal. *World Development*, 130, 104–914. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.1049 14>
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research planning and design*. New York, NY: Pearson Education.
- Mas'oeid, M. (2002). Peran Civil Society Sebagai Mitra Kerja Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Good Governance. *Jogjakarta: PKPEK Dan Forkoma MAP-UGM*.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research and evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Putra, B. K. (2022). Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 53–64.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i1.7091>
- Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JKN DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5325>
- Putra, B. K., & Dhanuarta, C. B. (2021). Transformation of Public Services Through Electronic-Based Government System in Malang City. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 4(3), 452–459. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5205295>
- Putra, B. K., & Hadi, K. (2022). State and Community Participation in the Democratization Process in Indonesia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others (IJEIT)*, 5(5), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7414335>
- Putra, B. K., & Hijri, Y. S. (2022). Participation of the State and Civil Society in the Democracy System in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 235–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7486365>
- Putra, B. K., & Salahudin, S. (2022). Analysis of Challenges and Potential of the Village Economy Towards Competitive Village Development. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(1), 45–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.11.1.45-60.2022>
- Putra, B. K., & Sihidi, I. T. (2022). Keterlibatan Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Proses Menuju Demokratisasi di Indonesia. *Hukum Responsif*, 13(2), 69–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7360>
- Rahmatulloh, R. (2013). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2022). The Effect of the Establishment of a New Autonomous Region on Electoral District Regulations in the 2024 General Election. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 484–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7269113>
- Sa'adawisna, D., & Putra, B. K. (2023). POLITICAL EDUCATION TO INCREASE BEGINNER VOTER PARTICIPATION IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS. *Awang Long Law Review*, 5(2), 419–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.716>
- Sager, F. (2018). Policy Evaluation and Democracy: Do they Fit? *Evaluation and Program Planning*, 69, 125–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.08.004>
- Sandy, T. R. (2018). Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). <https://doi.org/https://doi.org/http://digilib.unila.ac.id/33222/>
- Schwandt, T. A. (2015). *The Sage dictionary of qualitative inquiry*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Serek, J., & Lomicova, L. (2020). Adolescents Transitions Between Different Views on Democracy: Examining Individuallevel Moderators. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 66(March), 101–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101104>
- Sorensen, G. (1993). *Democracy and Democratization, Process, and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westview Press Inc.
- Stepan, A. (1978). *State and Society: Peru in Corporative Perspective*. New Jersey: Princeton University Press.
- Stutzer, A., Baltensperger, M., & Meier, A. N. (2019). Overstrained Citizens? The Number of Ballot Propositions and The Quality of The Decision Process in Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 59(5), 483–500. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpol eco.2019.05.008>
- Wahidah, N., Isro'ullaili, I., & Putra, B. K. (2023). The School Literacy Movement (GLS) and

- Student's Interest in Reading at SDN 3 Suka Makmur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 559–564. [https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7826963](https://doi.org/10.5281/zenodo.7826963)
- Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 25(1), 54–67. [https://doi.org/https://doi.org/10.33503/paradigma.v25i1.484](https://doi.org/10.33503/paradigma.v25i1.484)